

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terma populisme begitu membingungkan, kita belum bisa memahami atau bahkan menemui satu pandangan umum terkait apa itu populisme. Anehnya, kata populisme ini digunakan di seluruh dunia baik itu oleh para ilmuwan, media, komentator politik, bahkan politisi itu sendiri. Jika kita mendengar kata demokrasi kita bisa memahaminya dengan kata kebebasan atau kedaulatan rakyat disana, penjelasan selanjutnya adalah menyangkut variasi konsep saja. Berbeda dengan populisme yang digunakan dalam pengertian yang beragam.

Dalam perkembangannya, populisme diartikan sebagai perlawanan politik seperti perlawanan terhadap kepemimpinan diktator. Dalam pengertian yang lain, kita akan melihat populisme ini dalam tema ideologis, semisal perlawanan kelas dalam marxisme. Populisme ini terus digunakan, namun pengertian atasnya masih saja diperdebatkan. Konteks masyarakat masing-masing zaman – serta tempat dimana pengertian populisme itu dilahirkan – sangat mempengaruhi pengertian atas populisme, akibatnya ketika konteks sosial-politiknya berubah pengertian yang sama tidak bisa lagi digunakan. Pada masa feodal populisme itu diartikan dalam tema masyarakat agraris, tidak demikian ketika berkembangnya ajaran Marxisme, pada masa itu pengertian tentang populisme kerap kali diartikan dalam tema ideologis yang mana populisme diartikan dalam bentuk perlawanan kelas masyarakat industri. Hal yang sama juga terjadi pasca perang dingin, setelah

runtuhnya Soviet dan piala pengaruh kuasa jatuh kepada blok barat dengan ideologi yang dibawanya. Pada era ini populisme diartikan dalam bentuk lain dan lebih kompleks.

Terma populisme ini terus digunakan dari masa ke masa namun ia belum bisa dipahami secara universal sebagai sebuah konsep yang bisa dipahami dalam satu esensi yang sama¹. Populisme selalau saja harus dipahami dengan pemahaman sejarah yang melingkupi zamannya. Hal ini tentu menjadi sebuah komplikasi pada pemahaman manusia universal terkait terma populisme, ia belum bisa dipahami tanpa sejarah zamannya.

Dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh LSE (London School of Economics) pada tahun 1967, para ilmuwan yang bergelut dengan terma populisme ini berkumpul dan mendiskusikan terma yang membingungkan ini. Konferensi ini hadir karena terma populisme digunakan dalam berbagai gejala sosial-politik di berbagai belahan dunia, kejanggalannya adalah tidak adanya pemahaman yang sama dari setiap pengertian akan populisme tersebut².

Dalam konferensi tersebut setidaknya hadir 37 nama besar yang bergelut dengan terma populisme. Konferensi tersebut terbagi dalam 3 sub-sesi; pertama, *types of populism*. Kedua, *essential aspects*. Ketiga, *toward a definition*. Ketiga

¹ Margaret Canovan, 1981. *Populism*. New York: HBJ. Hal. 7

² Weidenfield, 1967. *To Define Populism*. London: Oxford University Press.

sub-sesi ini terangkum dalam sebuah *conference proceeding* yang dipublikasikan oleh Oxford university press dengan tajuk *to Define Populism*³.

Langkah awal yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut adalah dengan menilik satu persatu definisi dari masing-masing populisme yang diusung oleh penggunanya. Penilikan tersebut dibagi secara geografis, mulai dari tipe populisme di Rusia, Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika, dan Asia. Pada tahap ini belum terlihat pengerucutan definisi dari populisme, sebaliknya ia malah semakin memperlihatkan keberbedaannya satu sama lain.

Langkah kedua dalam konferensi ini untuk mencapai pemahaman universal atas populisme adalah dengan membuat batasan pada pemaknaan populisme dengan aspek yang spesifik:

“Most of the contributions included in this sub-section, attempt to define, within severe limitations of space, those specific aspects of populism which could provide the basis for a conceptual examination”⁴

Dalam sesi ini muncul berbagai pendekatan yang digunakan dalam memahami populisme; pendekatan ideologi, ekonomi-politik, struktural, agrarian, kelas, gerakan intelektual dan sosial dan lain sebagainya muncul dan saling tumpang tindih dalam sesi ini, dengan kata lain adanya esensi yang coba dilekatkan pada terma populisme. Terlepas dari hal itu, setidaknya dalam sesi ini mulai terkerucutkan pengertian dari populisme itu dengan pendekatan yang terbatas, sehingga keberagaman yang sebelumnya belum bisa dikategorisasi menjadi lebih

³ Ibid

⁴ Ibid

teratur dan bisa dipahami dengan masing-masing pendekatan meskipun belum ada kesepakatan pendapat yang paling universal terkait populisme.

Pada sesi ketiga *toward a definition*. Masing-masing pendekatan tersebut mencoba mendefinisikan populisme, namun definisi yang paling universal yang disepakati peserta diskusi tersebut muncul dari George Hall:

“Populist movements are movements aimed at power for the benefit of the people as a whole which result from the reaction of those, usually intellectuals, alienated from the existing power structure, to the stresses of rapid economic, social, cultural or political change. These movements are characterized by a belief in a return to, or adaptation of, more simple and traditional forms and values emanating from the people, particularly the more archaic sections of the people who are taken to be the repository of virtue.”⁵

Dalam penutupan konferensi tersebut disebutkan bahwa topik terkait populisme tersebut begitu luas, tidak cukup untuk dipahami dalam satu definisi dalam sekali diskusi. Hal ini menunjukkan bahwasanya definisi tersebut juga masih belum membuat lega sepenuhnya pemahaman atas populisme. Hal yang bisa kita reduksi dari definisi George Hall tersebut adalah bahwa gerakan populis itu adalah gerakan yang ditujukan pada penguasa untuk keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Persoalannya penjelasan setelahnya mengandung berbagai esensi sejarah zamannya masing-masing, sehingga pendekatan yang digunakan setelah definisi tersebut menjadi lebih kompleks dan tidak memungkinkan digunakan di luar dari konteks sejarah zamannya.

Selanjutnya Margaret Canovan dalam bukunya yang berjudul “Populism” membuat kategori populisme. Sebelum masuk ke dalam kategori yang paling

⁵ Ibid

universal, kita akan melihat beberapa model populisme yang direduksi oleh

Canovan:

*"1. "The socialism which [emerges] in backward peasant countries facing the problems of modernization." 2. "Basically the ideology of small rural people threatened by encroaching industrial and financial capital." 3. "Basically a rural movement seeking to realize traditional values in a changing society." 4. "The belief that the majority opinion of the people is checked by an elitist minority." 5. "Any creed or movement based on the following major premiss: virtue resides in the simple people, who are the overwhelming majority, and in their collective traditions." 6. "Populism proclaims that the will of the people as such is supreme over every other standard." 7. "A political movement which enjoys the support of the mass of the urban working class and/ or peasantry but which does not result from the autonomous organizational power of either of these two sectors.""*⁶

Ketujuh cara pandang terhadap populisme ini dirangkum oleh Canovan dalam bukunya yang berjudul "Populism" sebagai upaya pembentukan suatu pemahaman yang universal atas populisme. Dari ketujuh pemahaman atas populisme ini kemudian Canovan mereduksinya lagi ke dalam dua kategori atas populisme:

"Agrarian Populisms

- 1. Farmer radicalism (e.g., the U.S. People's Party)*
- 2. Peasant movements (e.g., the East European Green Rising)*
- 3. Intellectual agrarian socialism (e.g., the narodniki)*

Political Populisms

- 4. Populist dictatorship (e.g., Peron)*
- 5. Populist democracy (i.e calls for referendum and "participation")*
- 6. Reactionary populism (e.g., George Wallace and his followers)*
- 7. Politicians' populism (i.e., broad, non-ideological coalition-building that draws on the unificatory appeal of "the people")"*⁷

Sisi paradoksnya adalah bukankah populisme agrarian itu juga politis? Pada titik ini kategori dari Canovan tersebut menjadi buram, sehingga pengertian populisme yang beragam tadi harus kembali pada pengertian-pengertian awalnya.

⁶ Margaret Canovan, 1981. *Populism*. New York: HBJ

⁷ ibid

Dalam buku tersebut Canovan mencoba memahami populisme dengan membuat kategori dari keberagaman pengertian atas populisme.

Pada bagian akhir bukunya, Canovan mengakui bahwasanya satu kasus populisme secara empirik bisa saling tumpang tindih pada kategori yang dibuat olehnya. Artinya, usaha pengkategorian populisme oleh Canovan ini ke dalam esensi tertentu, masih belum paripurna bahkan belum memuaskan untuk Canovan itu sendiri.

Selanjutnya Ernesto Laclau dalam usahanya untuk meletakkan populisme ke titik paling universalnya atau biasa kita sebut dengan ontologi. Cara yang dilakukan Laclau dalam mengurai kompleksitas populisme itu adalah dengan mengurai hingga unit terkecilnya yaitu tuntutan (*demand*). Tuntutan itu bisa tampak atau terbaca dalam artikulasi. Artikulasi ini tidak bisa dipahami secara literal begitu saja tapi ia membawa berbagai tuntutan di dalamnya.

“The first path is to split the unity of the group into smaller unities that we have called demands: the unity of the group is, in my view, the result of an articulation of demands. This articulation, however, does not correspond to a stable and positive configuration which could be grasped as a unified whole: on the contrary, since it is in the nature of all demands to present claims to a certain established order, it is in a peculiar relation with that order, being both inside and outside it.”⁸

Hal menarik dari teori Laclau ini adalah bahwa ia justru menghilangkan segala bentuk esensi dari berbagai pendekatan sebelumnya dan membuat entitas di dalamnya tampak begitu natural. Ia hanya membahasakannya sebagai tuntutan atau *demand* ketika para pendahulunya menafsirkan tuntutan itu ke dalam esensi tertentu. Yang tersirat dari kenyataan itu ialah kongtingensi sebagai antonim dari

⁸ Ernesto Laclau. 2005. *On Populist Reason*. Verso: London. Hal. x

esensi. Di dua kutub inilah terbelahnya teori Laclau tentang populisme dengan para pendahulunya.

Sebelumnya kita sudah melihat bahwa populisme dipahami dengan berbagai macam pendekatan entah itu orientasi ideologi, atau dalam gerakan masyarakat agraris melawan tindakan kapitalistik. Laclau menghindari pendekatan ideologis ataupun pendekatan yang melihat realitas dalam kungkungan ruang dan waktu sejarah seperti gerakan masyarakat agraris dan sebagainya – dalam upaya memberikan pemahaman ontologis. Laclau lebih melihat populisme sebagai logika politik (*political logic*) agar ia bisa terbebas dari esensi ideologi ataupun pemahaman yang khusus “*it should be clear at this stage that by 'populism' we do not understand a type of movement - identifiable with either a special social base or a particular ideological orientation - but a political logic*”⁹.

Pilkada DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu – yang dilakukan secara periodik – untuk menentukan Pemimpin DKI Jakarta periode 2017-2022. Pilkada tersebut memancing masalah nasional dengan isu identitas yang pekat di dalamnya pada masa kampanye calon. Tersandungnya salah satu calon gubernur DKI Jakarta atas kasus penistaan agama mengundang aksi dan opini tersendiri dari berbagai kalangan. Hal ini membuat wacana politik yang selama ini dikesampingkan justru mencuat ke hadapan publik.

⁹ ibid

Kandidat pasangan calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tahun 2017 adalah 1) Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni dengan partai pengusung Demokrat, PAN, PKB, PPP. 2) Basuki Tjahja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dengan partai pengusung PDI-P, Golkar, Hanura, dan Nasdem ditambah dukungan PSI dan PKPI. 3) Anies Baswedan - Sandiaga Salahudin Uno dengan partai pengusung Gerindra dan PKS.

Ada hal yang menyita perhatian pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tersebut hingga menarik perhatian para sarjana untuk mempelajari fenomena politik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Berawal dari postingan Facebook seorang pengguna yang menyebarkan video Basuki Tjahja Purnama – alias Ahok – yang berpidato di depan masyarakat Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dan mengundang perhatian banyak orang termasuk beberapa Ormas Islam yang menuntut agar Basuki Tjahja Purnama dipidanakan atas kasus penistaan agama. Aksi inilah yang menarik perhatian publik.

Tahun 2016 adalah sebuah momen berserjarah lagi penting bagi pergerakan Islam politik di Indonesia. Pasalnya gerakan yang digadang-gadangkan sebagai manifestasi dari populisme Islam ini meledak dan memutihkannya Monas (Monumen Nasional). Gerakan ini disebut dengan gerakan Aksi Bela Islam 212 (ABI 212), terjadi menjelang pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta yang mana Ahok alias Basuki Tjahja Purnama, muncul sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Ahok tersandung kasus penistaan agama ketika berpidato di depan masyarakat Kepulauan Seribu dan diberi label oleh kalangan tertentu sebagai “penista agama”. Bersamaan dengan bergulirnya kasus penistaan agama oleh Ahok, hegemoni

diskursus akhirnya memunculkan momen populis yang dikenal dengan Aksi Bela Islam 212. Berawal dari momentum tersandungnya Ahok dengan kasus penistaan agama, lebih jauh lagi artikulasi yang muncul melebar hingga mencapai ranah politik praktis, ekonomi dan sosial budaya, kita akan lihat bagaimana pelebaran itu terjadi pada paragraf-paragraf selanjutnya. Pelebaran artikulasi tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat perkembangannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Chantal Mouffe bahwa “momen populis merupakan ekspresi dari pelbagai resistensi terhadap transformasi ekonomi politik”¹⁰. Momen populis tidak terjadi begitu saja, sebelum momen itu terjadi dibutuhkan diskursus yang menghadirkan subjek politik, sederhananya membelah masyarakat ke dalam kanal tertentu dan di sanalah subjek memaknai dirinya dalam ranah politik, dengan cara itu subjek politik identitas memungkinkan untuk hadir.

Momentum ini menjadi sangat berarti bagi kalangan Islam politik yang sebelumnya bertentangan dengan Ahok untuk memanifestasikan gerakan-gerakan yang ada sebelumnya untuk menjadi lebih besar dengan mengumpulkan *ummah*¹¹ untuk memperkuat barisan melawan penindasan yang dilakukan oleh penguasa yang mesra dengan kalangan borjuasi yang bukan berasal dari pribumi “Penyebab kemunculan Aksi Bela Islam GNPf-MUI, yaitu konteks Ahok menjadi kandidat calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, adanya sentimen anti-Ahok,

¹⁰ Chantal Mouffe. 2020. *Populisme Kiri*. Antinomi: Yogyakarta. Hal. 13

¹¹ Dalam pandangan Abdul Rashid Moten, dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Politik Islam”, ia menyebutkan bahwa “ummat secara eksklusif merujuk pada orang-orang beriman (*mu'min*) dan dipertentangkan dengan orang-orang kafir. Lihat Abdul Rashid Moten. 1996. *Ilmu Politik Islam*. Pustaka: Bandung. Hal. 79

dan puncaknya penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu”¹², wacana itu digulirkan oleh berbagai pihak, khususnya ormas Islam. Bentuk sentimen yang muncul adalah sentimen nativisme karena Ahok non-muslim dan berasal dari etnis Tionghoa ditambah lagi dengan karakter Ahok yang dinilai buruk serta kebijakan yang dinilai merugikan banyak pihak khususnya muslim di Jakarta. Penolakan tersebut diperkuat dengan penggunaan dalil Alquran dan Hadis tentang haramnya memilih pemimpin kafir sebagai pemimpin. Demikian setidaknya yang dapat kita tarik dari temuan-temuan Rangga Kusumo.

Kita coba ajukan sebuah contoh; ketika kebijakan suatu pemerintah dianggap menindas masyarakat pribumi sedangkan pemerintah tersebut punya kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan negara lain – katakanlah Cina – lantas hal ini memunculkan nativisme hingga menysar juga kepada etnis Tionghoa walaupun mereka secara pencatatan sipil merupakan warga negara Indonesia dan memang sudah turun temurun hidup di Indonesia. Contoh ini merupakan bentuk pengasosiasian simbol tertentu sehingga ia dimaknai dengan nativisme; Cina dan penindasan, bahkan juga melebar ke penandaan lain seperti komunisme. Pertanyaan apakah semua etnis Tionghoa demikian? Ini sulit untuk dikatakan “ya”, tapi karena simbol Tionghoa itu seakan diklaim bahwa semua etnis Tionghoa akan menindas, sebab-sebab klaim inilah yang disebut dengan kontingensi.

¹² Rangga Kusumo, “Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017” (Jurnal Politik, Pusat kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018) hlm. 87-110

Gerakan Aksi Bela Islam 212 ini diwadahi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Secara eksplisit Gerakan Aksi Bela Islam 212 adalah untuk menuntut agar Ahok atau Basuki Tjahja Purnama diproses secara hukum karena dianggap telah menista agama, namun menariknya muncul narasi-narasi yang lain yang selama ini tersedimentasi di tengah masyarakat. Artinya, ada artikulasi yang berada di luar kendali GNPF-MUI – narasi yang tidak terformalisasi dalam bentuk tuntutan gerakan. Artinya sulit untuk memahami Aksi Bela Islam 212 ini dari gerakan itu sendiri, ia merupakan jalinan dari berbagai macam tuntutan yang tidak terformalisasi dalam tuntutan resmi GNPF-MUI, inilah yang disebut dengan *chain of equivalent*, dimana berbagai macam tuntutan (*demand*) yang asimetris itu muncul ke ruang-ruang publik.

Dari sana mulai disuarakan dan beredar isu agama tentang kafir dan muslim – dimana dengan terma tersebut terbentuklah suatu batasan antagonisme yang bersifat politis dalam konteks politik – begitu juga isu etnis tentang pribumi dan non-pribumi. Isu ini adalah yang gagal di jembatani oleh penguasa, sehingga ia tersingkir dan membangun kekuatan baru. Penguasa yang dimaksudkan disini adalah kekuasaan yang formal dan kekuatan politik yang baru muncul itu adalah kelompok yang terpinggirkan oleh kekuasaan yang mapan tersebut. Nyatanya politik bukan hanya tentang memperjuangkan kepentingan pembangunan semata, namun juga kepercayaan masyarakat.

Ada banyak literatur yang membahas tentang populisme dengan berbagai varian dari populisme itu begitupun dengan perdebatan para ilmuwan tentang populisme itu sendiri. Pengembangan keilmuan terkait populisme belakangan ini

sudah berkembang dengan luas di tangan para ilmuwan, maka dari itu penelitian ini ingin mengambil salah satu posisi untuk memperluas khazanah terkait populisme khususnya Populisme Islam.

Dari literatur terdahulu yang - dalam konteks ini - peneliti mulai dengan kajian dari Vedi R. Hadiz yang termaktub dalam bukunya yang berjudul “Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah” mengatakan bahwa populisme “Islam baru merupakan bentuk spesifik mobilisasi sosial berbasis koalisi multikelas yang asimetris”¹³. Pendefinisian ini harus kita pandang dalam kerangka pendekatan yang dilakukan oleh Vedi yaitu dengan instrument pendekatan ‘ekonomi-politik dan sosiologi-sejarah’ sebagaimana yang Vedi nyatakan dalam bukunya “*menekankan pendekatan yang menaruh perhatian pada ekonomi-politik dan sosiologi sejarah sebagai penentu arah pembahasan*”¹⁴. Dengan pendekatan tersebut Vedi mendefinisikan populisme seperti yang sudah disebutkan di atas dan pendekatan tersebut penting untuk dipahami dalam melakukan pembacaan terhadap buku Vedi. R Hadiz. Secara singkat – tanpa mengurangi rasa hormat terhadap data-data yang disajikan Vedi dalam bukunya yang mengkomparasi Populisme Islam di tiga negara termasuk Indonesia – Vedi ingin menyampaikan dalam bukunya tersebut bahwasanya Populisme Islam merupakan sama dengan jenis populisme lainnya, alih-alih gerakan ideologis maupun ajaran agama. Kata ‘Islam’ menyifati

¹³ Vedi R. Hadiz. 2019. “*Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*”. LP3ES: Depok. Hal.40

¹⁴ Ibid

populisme yang dalam penggunaan praktisnya ‘Islam’ di sini merujuk pada identitas.

Endi Aulia Garadian yang menulis artikel yang berisikan komentar terhadap buku Vedi yang berjudul “Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah” mengatakan bahwa “*Dengan menekankan perspektif ekonomi-politik dan sosio-historis, poin penting yang ingin disampaikan oleh Vedi adalah motivasi kepentingan kelompok dan keuntungan ekonomi justru terbukti dapat melahirkan kekuatan politik Islam di tengah-tengah masyarakat, alih-alih ideologi maupun ajaran agama itu sendiri*”¹⁵. Argumen tersebut muncul tentunya tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan oleh Vedi dalam penelitiannya.

Kritikan atas pendefinisian Vedi muncul dari Rangga Kusumo yang terjun langsung ke masyarakat dan berinteraksi langsung dengan aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan ‘Aksi Bela Islam 212’. Ada beberapa poin yang di kritik oleh peneliti dengan nama Rangga Kusumo tersebut; 1) unsur multikelas dalam gerakan Aksi Bela Islam 212 tidak ditemui oleh Rangga Kusumo, yang ia temukan adalah multikelompok “adanya aliansi multikelompok yang terbentuk, berasal dari kelompok Islam moderat, kelompok Islam moderat-konservatif, kelompok Islam garis keras, masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran dan kelompok sekuler. Namun demikian, aliansi multikelas tersebut menurut penulis belum bisa dikatakan seutuhnya sebagai aliansi populisme Islam yang dimaksudkan oleh Vedi

¹⁵ Endi Aulia Garadian. Membaca Populisme Islam Model Baru. *Studia Islamika*. Vol. 24, No. 2. Hal. 380-393

R. Hadiz¹⁶. 2) Seruan dan tuntutan dari GNPF-MUI tidak sepenuhnya dipatuhi oleh peserta aksi 212, justru muncul narasi-narasi di luar tuntutan GNPF-MUI “Seruan yang telah disepakati oleh GNPF-MUI, yaitu bela Quran tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh peserta aksi. Muncul seruan-seruan lainnya seperti tolak pemimpin kafir dan pilih pemimpin Muslim. Kondisi tersebut membuktikan bahwa Ummah sebagai identitas bersama pemersatu, tidak sepenuhnya bisa diterima dan dipahami utuh oleh semua elemen yang terlibat dalam Aksi Bela Islam.”¹⁷.

Karena hal di atas, pendekatan yang digunakan oleh Vedi R. Hadiz dan Rangga Kusumo adalah berbeda, jika Vedi menggunakan pendekatan ekonomi-politik dan sosiologi-sejarah, sedangkan Rangga Kusumo melakukan studi kasus untuk pendalaman fenomena gerakan Aksi Bela Islam 212. Hal ini memperlihatkan cara pandang yang berbeda membuahkan hasil yang berbeda. Vedi bisa mendefinisikan populisme sebagai koalisi multi kelas karena ia menggunakan pendekatan sosiologi-sejarah dan ekonomi-politik dalam pekerjaannya, jadi ia tidak serta merta hanya berbicara pada kasus 212. Sedangkan Rangga Kusumo menggunakan studi kasus pada gerakan 212 yang kerangka pandangnya terbatas pada aksi 212 semata, maka dari itu ia sulit untuk menangkap bahwasanya dalam populisme terdapat koalisi multikleas yang sifatnya vertical, justru yang ditemuinya adalah masyarakat multi-kelompok yang berhubungan secara horizontal.

¹⁶ Rangga kusumo. *Op.cit*

¹⁷ Rangga Kusumo. *Op.cit*

Selanjutnya pendekatan yang muncul adalah pendekatan *discourse* (diskursus) yang di kalangan akademisi sosial-politik dikenal dengan *TPD* (*Theory Political Discourse*), suatu pendekatan dengan menggunakan diskursus sebagai objek analisisnya. Pertama peneliti ingin menggarisbawahi bahwa untuk diskursus ini peneliti berangkat dari Ernesto Laclau. Peneliti mengutip argumen seorang akademisi bernama Mario E. Poblete yang secara serius mempelajari pemikiran-pemikiran Ernesto Laclau dalam mendefinisikan diskursus dalam pandangan Laclau

“the discursive structure of this approach is made up of meaningful social relationships and contemplative entities. Hence, poststructuralism states that discourse can correspond to a group of ideas as well as to a group of meaningful actions. Moreover, every social practice has two main characteristics: it has meaning, and is fundamentally political. In other words, it embodies discourse. Laclau, unlike Hawkins, makes no reference to discourse in a narrow sense, but rather understands it as a set of phenomena that produce social meaning and establish society as such”¹⁸.

Dalam bentuk yang sederhana “wacana adalah totalitas struktural dari keberbedaan”¹⁹. Dalam pandangan Laclau setiap tindakan sosial mengandung 2 karakteristik; pertama, ia punya makna. Kedua, secara mendasar tindakan sosial itu “*political*”.

Adalah benar bahwa fenomena populisme Islam yang dimanifestasikan dalam gerakan Aksi Bela Islam 212 ini adalah isu nasional, namun massa aksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat yang notabene adalah

¹⁸ Mario E. Poblete. 2015. How to Assess Populist Discourse through Three Current Approaches. *Journal of Political Ideologies*. Hal. 201-218

¹⁹ Irawanto, B. (2018). Analisis Wacana A la Laclau. In W. Udasmoro, *Hamparan Wacana* (pp. 3-105). Yogyakarta: Penerbit Ombak.

masyarakat Minangkabau yang tidak bisa dilepaskan dari Islam. Pertama peneliti ingin menggarisbawahi bahwa belum banyak populisme Islam dikaji dengan pendekatan diskursus, kedua bahwa aksi Aksi Bela Islam 212 adalah fenomena nasional namun kekuatannya berasal dari berbagai daerah di Indonesia sebagaimana dalam teori Laclau tentang populisme bahwa salah satu penyokong populisme adalah dengan adanya *demand* atau tuntutan “*the unity of the group is, in my view, the result of an articulation of demand*”²⁰. Wacana dari berbagai daerah ini belum banyak dikaji dengan pendekatan diskursus, bahwa dengan pendekatan diskursus peneliti memungkinkan untuk membongkar makna di balik masyarakat yang di sisi lain juga membangun masyarakat tersebut alih-alih di pandang dengan cara pandang ideologis.

Apa yang terjadi dalam Aksi Bela Islam 212 berikut juga dengan simbol atau penanda yang dibawanya, adalah bentuk penyederhanaan dari berbagai kompleksitas *demand* atau tuntutan yang tidak muncul begitu saja dalam gerakan tersebut. dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali pemaknaan atas simbol dari unit yang lebih kecil dari pada gerakan tersebut yang muncul di tingkat nasional. Ada banyak kemungkinan untuk membagi unitnya menjadi lebih kecil, namun disini peneliti mengambil unit kedaerahan sebagai bentuk yang paling sederhana untuk dibagi lagi ke dalam beberapa kategori materil.

²⁰ Ernesto Laclau. 2005. *On Populist Reason*. Verso: London. Hal. xi

1.2 Rumusan Masalah

Terma populisme seringkali disematkan dengan pemaknaan yang buruk karena terma populisme ini kerap digunakan dan dimaknai untuk mendiskualifikasi pandangan yang berlawanan dengan *status quo*. Pada kesempatan ini peneliti ingin memandang terma dan gerakan populisme ini sebagaimana adanya sekaligus eksistensinya sebagai fenomena sosial-politik yang menyita perhatian nalar intelektual. Peneliti ingin menggali pemaknaannya dalam diskursus gerakan tersebut melalui analisis wacana yang dikembangkan secara teoritik oleh Ernesto Laclau beserta para sarjana yang berkontribusi dalam membangun teori analisis wacana dari Ernesto Laclau.

Pada dasarnya Gerakan Aksi Bela Islam 212 hanyalah sebuah momentum untuk menyuarakan ketidakpuasan yang partikular di masyarakat, dengan kata lain terdapat artikulasi dari masyarakat yang disatukan dalam Gerakan Aksi Bela Islam 212. Dalam konteks Sumatra Barat yang notabeneanya adalah masyarakat Minangkabau memiliki pemaknaan tersendiri terhadap aksi tersebut yang berbeda dengan yang lain. Secara teoritik asumsinya setiap penanda punya petanda, setiap simbol punya pemaknaan. Minangkabau itu sendiri adalah simbol atau penanda (*signifier*) yang dimaknai oleh subjeknya. Subjek ini punya pandangan tersendiri terhadap politik.

Dalam sebuah berita yang diterbitkan oleh JPNN.com disebutkan bahwa adanya keterlibatan FMM (Forum Masyarakat Minang) “Memang sesuai rencana kemarin kita akan berangkat pada pagi ini, semoga saja selamat hingga sampai

ditujuan,” ujar Irfianda Abidin, wakil FMM saat ditemui Padang Ekspres”²¹. Selanjutnya, dalam artikel tersebut, Irfianda Abidin menyatakan adanya donatur dalam aksi tersebut “*Ini sangat kita sesalkan, memang ada beberapa donatur yang memundurkan diri karena sebelumnya ada yang menyumbangkan 10 bus maupun yang lainnya. Sampai di Jakarta nanti kami akan melakukan dzikir dan shalat Jumat Bersama di Monas dan di Masjid Istiqlal*”²². Dalam berita tersebut terdapat indikasi adanya beberapa kalangan yang terlibat dalam gerakan tersebut. Secara teoritik adanya gerakan bersama itu dimungkinkan adanya kesamaan simbol atau penanda, namun bukan berarti simbol tersebut membawa pemaknaan yang sama bagi setiap subjeknya. Selain itu juga ada partai politik yang terlibat dalam gerakan ini dan tentu saja memiliki konsekuensi terhadap perolehan suara mereka dalam pemilihan. Endi Aulia Garadian dalam sebuah jurnal yang bertajuk *Membaca Populisme Islam Model Baru* menyebutkan:

“kecenderungan rezim dalam membela Ahok sang penista agama dan, yang paling terbaru namun sebetulnya tidak relevan dengan perjuangan ummah, memboikot para kandidat presiden dan legislatif yang diusulkan oleh PDIP, Nasdem, PPP, PKB, Hanura dan Golkar karena menyetujui ambang batas presidensial (Presidential Threshold) sebesar 20%. Hal ini, terutama yang nomor tiga, merupakan pesan politis yang bila dicermati sarat dengan kepentingan para elit politik yang tergabung dalam Aksi Bela Islam beberapa bulan silam”

Data yang ditemukan oleh Endi Aulia Garadian tersebut menyuratkan bahwa ada partai politik yang juga terlibat di dalam gerakan ini, artinya partai-partai tersebut mengasosiasikan diri ke dalam gerakan tersebut, di mana gerakan tersebut

²¹Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "14 Ribu Massa dari Sumbar Ikut Aksi 212 di Jakarta",

<https://www.jpnn.com/news/14-ribu-massa-dari-sumbar-ikut-aksi-212-di-jakarta>

²² *Ibid*

adalah suatu simbol yang mana oleh partai politik ini juga memiliki pemaknaan tersendiri atas gerakan tersebut. berikut adalah partai-partai yang mengasosiasikan diri ke dalam gerakan 212:



Figure 1 gambar yang ditemukan pada pesan Whatsapp dan Pinterest

Gambar yang ditemukan pada pesan Whatsapp dan pinterest²³



Budi Irawanto menyatakan dalam buku yang bertajuk *Hamparan Wacana* menyatakan bahwa “tugas dari seorang penganalisis wacana lantas menentukan gerak dari perjuangan itu dengan memastikan makna di semua tingkatan sosial”²⁴. Sejalan dengan pendefinisian Vedi R. Hadiz yang sebelumnya sudah disinggung, bahwasanya Vedi mendefinisikan populisme sebagai “aliansi multi kelas yang

²³ Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/349240146094648245/>

²⁴ Budi Irawanto. 2018. *Hamparan Wacana*. Ombak; Yogyakarta. Hal. 83

asimetris”. Ernesto Laclau dalam bukunya yang berjudul “*On Populist Reason*” menyatakan bahwa “*populism as one way of constituting the very unity of the group*”²⁵. Lebih jauh lagi, Chantal Mouffe menafsirkan – populisme dari Ernesto Laclau – dalam bukunya yang berjudul “*Populisme Kiri*” sebagai “populisme sebagai strategi diskursif untuk mengkonstruksi batas politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu dan menyerukan untuk memobilisasi rakyat (*‘underdog’*) melawan penguasa (*‘those in power’*)”²⁶. Pengertian yang demikian tentu tidak lepas dari teori yang dibangun oleh Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau dalam buku yang mereka tulis bersama dengan judul “*Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*”, disana mereka menyatakan bahwa “*The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse*”²⁷, atau sederhananya dapat kita artikan sebagai totalitas struktural dari keberbedaan.

Dalam pandangan Marxisme, kelas yang vertikal itu berada dalam hubungan yang saling berkonfrontasi atau yang sering kita kenal dengan istilah pertentangan kelas, sedangkan sekarang ini para sarjana memaparkan bahwasanya saat ini kelas itu memungkinkan untuk berkoalisi, seperti Vedi R. Hadiz. Ini adalah hal yang menarik yang peneliti sadari. Ini adalah bentuk pengujian atas teori

²⁵ Ernesto Laclau. 2005. *On populist reason*. Verso: London. Hal. 73

²⁶ Chantal Mouffe. 2020. *Populisme Kiri*. Antinomi: Yogyakarta. Hal. 11

²⁷ Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics*. Hal. 105

ortodoks Marx terhadap zaman – meskipun tentu saja tidak semua gerakan multi-kelas kita sebut populisme.

Terlepas dari perbedaan secara horizontal ataupun vertikal, yang jelas *unity* atau kesatuan gerakan itu terbentuk dari suatu sistem keberbedaan yang berhasil disatukan dalam satu simbol atau penanda yaitu gerakan Aksi Bela Islam 212 (ekuivalensi), meskipun tidak terangkum secara formal seperti dalam tuntutan yang dilayangkan oleh GNPf-MUI.

Maka dari itu, peneliti hendak menjelaskan pemahaman atas totalitas tersebut melalui apa yang dianjurkan oleh Budi Irawanto yaitu menjangkau makna dari masing-masing tingkatan sosial. Berdasarkan pemaparan sebelumnya peneliti di sini mengedepankan pertanyaan penelitian “bagaimana subjek yang berasal dari Sumatra Barat memaknai gerakan Aksi Bela Islam 212? apa yang menjadi *nodal point* dari gerakan Aksi Bela Islam 212 Sumbar? Dan bagaimana *chain of equivalence* terbentuk – merujuk pada subjek memaknainya di Sumatra Barat?”

Asumsi peneliti dengan adanya kalangan Ormas (seperti FPI, FMM, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah), partai politik (seperti PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat), pengusaha, dan *institutional interest group* (MUI). Secara fungsi dan orientasi, masing-masing kategori ini memiliki perbedaan, namun dalam gerakan Aksi Bela Islam 212 ini mereka berada di bawah simbol atau penanda yang sama. Sangat memungkinkan mereka memiliki pemaknaan yang berbeda. Jika yang diatas adalah asumsi empiriknya, maka asumsi teoritiknya; peneliti meyakini bahwa gerakan Aksi Bela Islam 212 ini tidak terpusat atau penyebabnya itu tidaklah

tunggal, ia terbentuk dengan; 1. Ketidakterpusatan kuasa dalam gerakan, 2. Ketidakterpusatan kuasa ini mengindikasikan sebab-sebab yang partikular. Peneliti mengasumsikan bahwa gerakan 212 yang dari Sumbar sendiri juga terbentuk dari sistem keberbedaan juga yang berhasil disatukan oleh gerakan Aksi Bela Islam 212.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menjelaskan makna dari masing-masing penanda sosial masyarakat dalam gerakan Aksi Bela Islam 212 dari Provinsi Sumatra Barat. Tujuan ini dapat dilakukan dengan menganalisis rantai ekuivalensi atau *chain of equivalent*. Hal ini penting untuk dianalisis karena dengan cara ini kita dapat memahami makna dari artikulasi yang begitu cair di masyarakat, sehingga kita bisa melihat populisme sebagai suatu wacana yang tersedimentasi di masyarakat yang berkemungkinan mampu menciptakan *chain of equivalent* diantara masyarakat yang begitu cair. Kita bisa melihat populisme sebagai makna sekaligus strategi politik yang dalam etika demokrasi memang layak untuk dipertarungkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a) Manfaat akademik. Secara akademik penelitian ini bisa menjadi tambahan kajian untuk literatur tentang populisme, khususnya populisme Islam. Sumatra Barat dengan karakter masyarakatnya menjadi objek yang menarik untuk dikaji dalam konteks populisme.

- b) Manfaat teknis. Secara teknis penelitian ini bermanfaat untuk memahami populisme sebagai strategi membangun kekuatan politik dengan model dan artikulasi tersendiri dalam satu konteks wacana.

